

Pembangunan Jalan KM 171 Satui Masih Dikoordinasikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/380055/pembangunan-jalan-km-171-satui-masih-di-koordinasikan-kementerian-pupr>

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah I, Kementerian PUPR, Bobby Ali Azhari, menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga agar segera menindak lanjuti permasalahan jalan nasional yang longsor akibat pertambangan di KM. 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Hal itu disampaikan oleh Bobby, saat kunjungan kerja jajaran Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Pemprov Kalsel, bersama perwakilan Dinas PUPR Kalsel, yang diikuti oleh perwakilan Jurnalis Presroom Pemprov Kalsel, di kantor Kementerian PUPR, di Jakarta, Jum'at. "Saya yakin teman-teman Bina Marga juga sudah mulai merencanakan, tadi dibilang bukan karena bencana ya, kalo bencana bisa dikerjakan langsung, kalo bukan bencana biasanya di desain dulu," kata Bobby.

Lebih lanjut Bobby menyampaikan, pihaknya belum tau kepastian rencana dimulainya pengerjaan pembangunan jalan akses utama Banjarmasin - Batulicin yang longsor tersebut. Bobby mengharapkan, tahun depan kementerian PUPR sudah dapat memulai pengerjaannya pembangunan jalan longsor tersebut, mengingat pentingnya akses tersebut bagi kelancaran lalu lintas masyarakat. "Karena pertengahan tahun ini

semua anggaran sudah teralokasi ya, moga moga tahun depan bisa segera dibantu lah teman teman disana,” ucap Bobby.

Selain terkait penanganan jalan nasional KM. 171, pada kunker Biro Adpim Prov Kalsel ini, juga dibahas tentang kelanjutan rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar, pembangunan Jalan Poros Banjarbaru - Tanah Bumbu dan pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pulau Laut Kota Baru. Kepala Biro Adpim Prov Kalsel, Berkatullah, menyampaikan melalui kunjungan ke Kementerian PUPR ini, banyak didapatkan informasi tindak lanjut rencana pembangunan di Kalsel mendatang, Mulai dari perbaikan jalan Satui yang longsor, perbaikan jalan tembus bandara dan pembangunan bendungan Riam Kiwa.

“Alhamdulillah para awak media bisa mendapat informasi langsung, dari sumber yang tepat, ini nanti bisa kita olah, kita berikan informasi ini kepada masyarakat,” kata Berkatullah.

Pada Kunker ke kementerian PUPR ini, Biro Adpim Prov Kalsel, mengajak 23 perwakilan media di Kalsel, dengan harapan kementerian PUPR dapat lebih memberikan prioritas terhadap pembangunan di Kalsel, terlebih Kalsel merupakan Gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN), yang di proyeksikan sebagai daerah penyangga pangan di IKN Penajam Paser Utara di Kaltim.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/380055/pembangunan-jalan-km-171-satui-masih-di-koordinasikan-kementerian-pupr>, 21 Juli 2023.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/50496-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-janji-tangani-jalan-km-171.html>, 23 Juli 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.